



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

## **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah Misi ke-6 (enam) yaitu: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan”.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-

Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan BrebesTegal-Pemalang;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

#### **I.4. SISTEMATIKA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Subbab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

#### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Subbab ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Subbab ini menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Subbab ini menguraikan dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

**3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,**

menguraikan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.



**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

#### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indicator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indicator lainnya. Penetapan indicator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2020**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp.34.885.031.002,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp.9.090.306.002,00 dan belanja langsung Rp.25.794.725.000,00. Dalam pelaksanaannya terjadi *refocusing* anggaran dampak pandemic covid-19 menjadi Rp.26.832.225.674,00 dengan belanja tidak langsung Rp. 8.185.046.650,00 dan belanja langsung Rp 18.647.179.024,00. Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 25.645.885.830 (95,57%).

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2019		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2020						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2020		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2020 (%)				
				K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	%			
								K	Rp	K	Rp							
				6		7												
3		4	4A	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas				0									0	0	0	0	
		Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	%	46.2	0	52		52		52		52		52	0	100	0	
	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan				0									0	100	0	0	
		Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan	%	46.01	0	49		49		49		49		49	0	100	0	
		Prosentase Angkutan Kendaraan Bermotor yang laik jalan	%	94.1	0	95		95		95		95		95	0	100	0	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				0		2.550.000.000				2.535.000.000		2.761.136.450		2.603.711.461	100	102.71	

		Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik	%	90	0	90		90		90		90	0	100	102.71
	Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan				400.000.000		400.000.000		300.000.000		315.448.500		280.280.127	100	93.43
		Jumlah prasarana dan fasilitas perlengkapan yang dipelihara	Unit	68	0	12		12		12		12	0	100	93.43
	Pemeliharaan Halte Bus				50.000.000		50.000.000		50.000.000		1.534.500		1.534.500	100	3.07
		Jumlah halte yang dipelihara menjadi kondisi baik	Unit	16	0	0		0		0		0	0	100	3.07
	Rehabilitasi/perbaikan Terminal tipe C				100.000.000		100.000.000						0	100	3.07
		Jumlah terminal Tipe C yang dipelihara	Unit	0	0	0		0		0		0	0	100	3.07
	Operasi dan Pemeliharaan /Perbaikan LPJU				1.800.000.000		1.800.000.000		1.200.000.000		1.565.000.000		1.451.552.284	100	120.96
		Jumlah LPJU yang terpelihara	Unit	1350	0	1000		1000		1000		1121	0	87	120.96
	Pendataan LPJU				100.000.000		100.000.000		75.000.000		7.395.950		7.395.950	87	9.86
		Jumlah lokasi LPJU yang terdata	Kec	4	0	0		0		0		1	0	87	9.86
	Retrovit dan Meterisasi LPJU				100.000.000		100.000.000		60.000.000		1.757.500		1.757.500	87	2.93
		Jumlah Retrovit dan Meterisasi LPJU	Unit	0	0	0		0		0		0	0	87	2.93
	Pengadaan Mobil Tangga				0				850.000.000		870.000.000		861.191.100	87	101.32
		Jumlah mobil tangga yang terbeli	Unit	0	0	0		0		0		1	0	87	101.32

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					0	9.500.000.000		8.452.225.000		8.066.494.180		7.955.742.649	87	94.13
	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan	%	47.1	0	50		50		50		50	0	100	94.13
	Persentase ketersediaan terminal	%	37.5	0	50.0		50.0		50.0		37.5	0	75	94.13
	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	41.4	0	43		43		43		43	0	100	94.13
	Prosentase berfungsinya APJ yang terpasang dengan baik	%		0	90		90		90		90	0	100	94.13
	Presentase ketersediaan APJ yang dibutuhkan	%		0	43.5		43.5		43.5		43.5	0	100	94.13
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan					100.000.000	100.000.000		500.000.000		100.000.000		96.838.049	100	19.37
	Jumlah warninglight yang terpasang	Unit	8	0	0		0		0		4	0	100	19.37
Pengadaan dan pemasangan rambu- rambu lalu lintas					100.000.000	100.000.000				300.000.000		297.588.357	100	19.37
	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	Unit	58	0	150		150		150		207	0	62	19.37
Pengadaan dan penggelaran marka jalan					1.500.000.000	1.500.000.000		1.000.000.000		505.899.780		499.515.815	62	49.95
	Jumlah marka jalan yang terpasang	m2	13221	0	800		800		800		800	0	100	49.95
Pengadaan dan pemasangan pagar					100.000.000	100.000.000						0	100	49.95

	pengaman jalan														
		Jumlah pagar pengaman jalan (Guardrail) yang terpasang	m	50	0	0		0		0		0	0	100	49.95
	Pengadaan alat pengaman pengguna jalan				200.000.000		200.000.000						0	100	49.95
		Jumlah cermin tikungan yang tersedia	Unit	56	0	0		0		0		7	0	100	49.95
		Jumlah delineator yang tersedia	Unit	0	0	0		0		0		0	0	100	49.95
		Jumlah pita pengaduh yang tersedia	m	0	0	0		0		0		0	0	100	49.95
	Pengadaan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ				150.000.000		150.000.000						0	100	49.95
		Jumlah barikade yang tersedia	Unit	40	0	0		0		0		0	0	100	49.95
		Jumlah trafficone yang tersedia	Unit	40	0	0		0		0		0	0	100	49.95
		Jumlah road barrier yang tersedia	Unit	35	0	0		0		0		0	0	100	49.95
		Jumlah barikade yang tersedia	Buah		0	0		0		0			0	100	49.95
		Jumlah road barrier yang tersedia	Buah		0	0		0		0			0	100	49.95
		Jumlah trafficone yang tersedia	Buah		0	0		0		0			0	100	49.95
	Pembangunan Halte Bus				150.000.000		150.000.000		95.000.000		51.460.000		50.960.000	100	53.64
		Jumlah halte bus baru terbangun	Unit	6	0	0		0		0		2	0	100	53.64
	Pembangunan Rest Area				0								0	100	53.64
		Jumlah rest area yang dibangun	Unit	0	0	0		0		0		0	0	100	53.64

	Pembangunan Terminal Type C				0							0	100	53.64
	Jumlah terminal tipe C yang dibangun	Unit	0	0	0		0		0		0	0	100	53.64
	Pengembangan LPJU			4.700.000.000		4.700.000.000		6.545.000.000		7.109.134.400		7.010.840.428	100	107.12
	Jumlah LPJU baru yang dipasang	Unit	998	0	750		750		750		869	0	84	107.12
	Jumlah LPJU baru yang dipasang	Unit		0	900		900		900			0	164	107.12
	Pembangunan Shelter/Halte Bus Aglomerasi Koridor Purwokerto - Purbalingga				0							0	164	107.12
	Jumlah shelter/halte bus beserta kelengkapannya yang terbangun	Unit	0	0	0		0		0		0	0	164	107.12
	Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Terminal Purwokerto				0							0	164	107.12
	Jumlah sarana prasarana pendukung Terminal Purwokerto yang dibangun	Unit	0	0	0		0		0		0	0	164	107.12
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				0	3.425.000.000		2.582.000.000		1.342.895.754		1.275.391.000	164	49.4
	Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	%	97	0	97		97		97		97	0	100	49.4



		Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	%	100	0	100		100		100		100	0	100	49.4
	Pengadaan ATCS				850.000.000		850.000.000						0	100	49.4
		Jumlah ATCS Terpasang	Unit	2	0	0		0		0		0	0	100	49.4
	Pengadaan Trafficlight				200.000.000		200.000.000		200.000.000				0	100	49.4
		Jumlah trafficlight yang terpasang	Unit	12	0	0		0		0		0	0	100	49.4
	Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perlintasan Sebidang KA				0								0	100	49.4
		Jumlah kajian manajemen yang tersedia	Dokumen	2	0	0		0		0		0	0	100	49.4
		Jumlah pintu perlintasan sebidang yang tersedia	Unit	1	0	0		0		0		0	0	100	49.4
	Trafficlight Responsive ATCS				0								0	100	49.4
		Jumlah trafficlight responsif yang terpasang	Unit	0	0	0		0		0		0	0	100	49.4
	Pengadaan Sarana Derek				0								0	100	49.4
		Jumlah mobil derek yang dibeli	Unit	0	0	0		0		0		0	0	100	49.4
	Pembinaan Keselamatan LLAJ				200.000.000		200.000.000		160.000.000		89.632.000		87.547.000	100	54.72
		Jumlah peserta pembinaan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Orang	1843	0	150		150		150		150	0	100	54.72

	Sosialisasi/p enyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				150.000.000		150.000.000		75.000.000				0	100	54.72
	Jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Orang	50		0	0		0		0		0	0	100	54.72
	Operasional Pengawasan, Pengamanan , Pengaturan, Penertiban dan Pengendalian LL (P5LL)				800.000.000		800.000.000		1.232.000.000		656.766.500		637.048.681	100	51.71
	Jumlah kegiatan P5LL	Keg	228		0	50		50		50		185	0	-170	51.71
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor				150.000.000		150.000.000		75.000.000		40.020.424		39.404.424	-170	52.54
	Jumlah operasi uji laik kendaraan	Keg	131		0	20		20		20		45	0	-25	52.54
	Operasional dan Pemeliharaan / Perawatan ATCS				800.000.000		800.000.000		650.000.000		516.476.830		488.015.895	-25	75.08
	Jumlah ATCS/APIII yang dipelihara	Unit	22		0	4		4		4		4	0	100	75.08
	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Keselamatan Lalu Lintas				0								0	100	75.08
	Jumlah gedung keselamatan yang terbangun	Unit	0		0	0		0		0		0	0	100	75.08
	Pembinaan Usaha				100.000.000		100.000.000		70.000.000				0	100	75.08

	Perbengkela n dan Kendaraan Tak Bermotor													
	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Ora ng	0	0	0		0		0		0	0	100	75.08
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasi an Kendaraan Bermotor				0	6.700.000.000		6.175.000.000		1.045.284.280		978.907.146	100	15.85
	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	94.1	0	94		94		94		94	0	100	15.85
	Rehabilitasi/ pemeliharaa n prasarana balai pengujian kendaraan bermotor				200.000.000	200.000.000		550.000.000		15.832.500		15.632.500	100	2.84
	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Unit	14	0	14		14		14		14	0	100	2.84
	Operasional Pengujian Kendaraan bermotor				500.000.000	500.000.000		875.000.000		826.500.000		760.322.866	100	86.89
	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	19107	0	5625		5625		5625		13966	0	-48	86.89
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor				6.000.000.000	6.000.000.000		4.750.000.000		202.951.780		202.951.780	-48	4.27
	Jumlah alat uji PKB baru yang tersedia	Unit	0	0	0		0		0		0	0	-48	4.27
	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran				0	3.700.000.000		3.475.500.000		3.049.619.000		2.951.127.094	-48	84.91

		Persentase realisasi fisik program	%	100	0	100		100		100		100	0	100	84.91
		Persentase realisasi keuangan program	%	92.97	0	92		92		92		89.08	0	96	84.91
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah														
					350.000.000		350.000.000		250.000.000		292.000.000		261.756.800	96	104.7
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	3	0	12		12		12		12		0	100	104.7
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Kali	2	0	2		2		2		0		0	100	104.7
	Jasa instruktur kegiatan yang dibayar	Kali	20	0	20		20		20		4		0	180	104.7
	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun	2	0	1		1		1		1		0	100	104.7
	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah														
					700.000.000		700.000.000		700.000.000		450.000.000		445.512.333	100	63.64
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan	3	0	12		12		12		12		0	100	63.64
	bahan perlengkapan kerja tersedia	Buah	37	0	37		37		37		37		0	100	63.64
	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Buah	900	0	900		900		900		940		0	95	63.64
	alat listrik dan elektronik yang tersedia	Buah	11	0	11		11		11		16		0	54	63.64
	cetak dan penggandaan yang tersedia	lbr	10000	0	100000		100000		100000		78000		0	122	63.64
	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	3	0	12		12		12		12		0	100	63.64

	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah				450.000.000		450.000.000		458.000.000		488.000.000		457.733.454	100	99.94	
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang	19		0	19		19		19		19		0	100	99.94
	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah				750.000.000		750.000.000		750.000.000		489.619.000		485.175.210	100	64.69	
	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	3		0	12		12		12		12		0	100	64.69
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12		0	12		12		12		14		0	83	64.69
	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Kali	12		0	12		12		12		12		0	100	64.69
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		125.000.000		265.200.000		261.561.000	100	209.25	
	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	15		0	15		15		15		22		0	53	209.25

	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		70.000.000		70.000.000		69.964.350	53	99.95
	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	27	0	25		25		25		28		0	88	99.95
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		600.000.000		530.000.000		524.616.654	88	87.44
	gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	3	0	2		2		2		4		0	0	87.44
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		289.800.000		284.741.093	0	94.91
	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	27	0	27		27		27		27		0	100	94.91
	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit	16	0	13		13		13		13		0	100	94.91
	Kendaraan bermotor non roda 2 dan roda 4	Unit	2	0	1		1		1		3		0	-100	94.91
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah				300.000.000		300.000.000		175.000.000		175.000.000		160.066.200	-100	91.47

	Perangkat Daerah														
		Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	3	0	12		12		12		12	0	100	91.47
	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat				50.000.000		50.000.000		47.500.000				0	100	91.47
		dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Dokumen	0	0	1		1		1		0	0	100	91.47
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				0		225.000.000		150.000.000		460.748.730		448.948.402	100	299.3
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	0	100		100		100		100	0	100	299.3
		Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	98.9	0	50		50		50		100	0	200	299.3
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				225.000.000		225.000.000		150.000.000		460.748.730		448.948.402	200	299.3
		Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	9	0	8		8		8		8	0	100	299.3

		Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali	8	0	10		10		10		16	0	40	299.3
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Perangkat Daerah												0	40	299.3
		Jumlah Aparat Perencana Perangkat Daerah yang mengikuti capacity building	Orang	0	0	0		0		0		0	0	40	299.3
	Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah												0	40	299.3
		Kegiatan pemutakhiran data yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0		0		0		0	0	40	299.3
	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat												0	40	299.3
		Prosentase Panjang Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	%	81	0	80		80		80		80	0	100	299.3
	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						1.000.000.000		1.100.000.000		689.499.630		637.827.565	100	57.98
		Rasio ijin trayek		0.068	0	0.071		0.071		0.071		0.071	0	100	57.98



	Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				150.000.000		150.000.000		350.000.000		435.000.000		421.638.800	100	120.47	
	Jumlah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersedia	Dokumen	4		0	2		2		2		4		0	0	120.47
	Fasilitasi forum lalu lintas dan angkutan jalan				100.000.000		100.000.000		150.000.000		33.378.890		3.378.890	0	2.25	
	Jumlah rapat forum LLAJ dan Survey LHR yang terlaksana	Keg	12		0	2		2		2		4		0	0	2.25
	Operasional perizinan angkutan				100.000.000		100.000.000		50.000.000		34.069.500		34.068.500	0	68.14	
	Jumlah ijin trayek	Unit	15		0	50		50		50		102		0	-4	68.14
	Fasilitasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran				150.000.000		150.000.000		100.000.000		5.889.700		5.889.700	-4	5.89	
	Jumlah bus angkutan lebaran mudik gratis	Unit	8		0	0		0		0		0		0	-4	5.89
	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas													0	-4	5.89
	Jumlah dokumen Perencanaan Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang tersedia	Dokumen	0		0	0		0		0		0		0	-4	5.89
	Pembinaan Jasa Usaha Angkutan Umum				100.000.000		100.000.000		50.000.000		2.195.000		2.195.000	-4	4.39	

		Jumlah pelaku usaha jasa usaha angkutan umum yang dibina	Orang	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	4.39
	Penyusunan Masterplan Angkutan Umum di Kabupaten Banyumas				0							0	-4	4.39
		Jumlah dokumen Masterplan Angkutan Umum di Kab. Banyumas yang tersedia	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	4.39
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Trayek dan Kebutuhan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas				0							0	-4	4.39
		Jumlah dokumen Evaluasi Trayek dan Kebutuhan Angkot dan Angkudes	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	4.39
	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan				0	1.400.000.000	1.325.000.000	1.231.501.000			1.203.566.344		-4	90.84
		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	0	100	100	100	100	100	0	100	100	90.84
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Terminal Bus Purwokerto				600.000.000	600.000.000	575.000.000	556.501.000			555.918.000		100	96.68

		Jumlah tenaga PHL tenaga kebersihan dan pemungut retribusi yang dibayar honorinya	Orang	24	0	25		25		25		25	0	100	96.68
	Operasional Terminal tipe C				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		338.424.550	100	96.69
		Jumlah pendapatan retribusi terminal tipe C	Milyar Rupiah	241711900.202	0	85000000		85000000		85000000		113543800	0	66	96.69
	Operasional Perparkiran				300.000.000		300.000.000		200.000.000		125.000.000		109.889.400	66	54.94
		Jumlah pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum	Milyar Rupiah	12201015001.146	0	870000000		870000000		870000000		938470000	0	92	54.94
	Operasional Terminal Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Bulupitu				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		99.903.344	92	99.9
		Jumlah pendapatan retribusi Terminal Angkot Bulupitu	Milyar Rupiah	339546000.281	0	100000000		100000000		100000000		165280070	0	34	99.9

## **II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana, Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
4. Bidang Angkutan dan Keselamatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Keselamatan;
5. Bidang Prasarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana;
  - b. Seksi Terminal;
6. Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengendalian, dan Operasional;
  - b. Seksi Perparkiran;
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp.27.434.953.885,00 terurai dalam 3 program dan 13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat daritahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Tabel T-C.30  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Awal Period e Tahun 2018	Target Renstra Perubahan 2018- 2023				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analisi s
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	3	2	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rasio Konekti vitas Kabupate n/Kota			NA	NA	0,6865	0,8275	0,89	NA	NA	0,6865	0,8275	
2.	Indeks Konekti vitas angkutan Sungai			NA	NA	0,125	0,375	0,5	NA	NA	0,125	0,375	
3.	Indeks Konekti vitas angkutan Jalan			NA	NA	0,78	0,8	0,8	NA	NA	0,78	0,8	
4.	V/C Ratio di Jalan Kabupate n/Kota			NA	NA	0,74	0,74	0,74	NA	NA	0,74	0,74	

### **II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

#### **Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk Menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagaiberikut:

#### **A. Strenght (Kekuatan)**

1. SDM Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 213 orang (74 orang PNS dan 139 orang Pegawai Harian Lepas) dengan jenjang pendidikan beragam dari SD, SLTP, SLTA, D2, D3, D4, S1, dan S2. Untuk Pegawai Harian Lepas tersebar di 2 (dua) UPTD (UPTD PSPP terdapat 6 orang, UPTD PKB 19 orang), dan sebagian lagi ditempatkan di 3 Lokasi Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Dan pembagian tugas dan pekerjaan semaksimal mungkin disesuaikan dengan jenjang Pendidikan agar dapat menghasilkan output pekerjaan yang optimal.
2. Sarana dan Prasarana  
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas di dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana, Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana, Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, tentunya ditemukan kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Terbatasnya anggaran.

Tahun 2020 terjadi wabah COVID-19 yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Keadaan ini berdampak juga pada pengelolaan anggaran di semua pemda di Indonesia termasuk Kabupaten Banyumas. Refocusing Anggaran dilaksanakan pada tahun 2020 berdampak pada pemotongan anggaran di semua kegiatan. Padahal anggaran merupakan faktor utama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga visi dan misi OPD dapat tercapai. Dampaknya adalah ada resiko output kegiatan tidak dapat maksimal.



## 2. Terbatasnya lahan

Keterbatasan lahan ini dihadapi pada kegiatan rencana pembangunan terminal sokaraja. Yang mana dokumen studi DED sudah diselesaikan tetapi mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

### C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis *strength dan weakness*, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidangekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Daerah, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
2. Semakin berkembangnya kebutuhan akses dan kecepatan informasi serta perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis.
3. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang perhubungan.
4. Aset-set Dinas Perhubungan meliputi Kantor Utama di Kelurahan Tanjung, Gedung pengujian kendaraan bermotor beserta peralatan uji, dan 3 lokasi terminal menciptakan peluang apabila dikelola dengan baik untuk pelayanan masyarakat dan juga untuk mendukung terlaksananya tupoksi.
5. Adanya bantuan 2 (dua) armada bus sekolah yang merupakan hibah dari Kementrian Perhubungan guna untuk pelayanan transportasi gratis bagi siswa di Kabupaten Banyumas.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan;
2. Disiplin pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
3. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampaknya penggunaan kendaraan pribadi;
4. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan masih lambat;
5. Masih terpusatnya kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan dan kemacetan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Dinas Perhubungan Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan sesuai kebutuhan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guadrils, APILL dan PJU.
2. Pemanfaatan teknologi untuk pengendalian dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
3. Mengembangkan pelayanan angkutan penumpang yang menghubungkan perdesaan dan perkotaan
4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah yaitu terminal penumpang dan terminal barang.

## **II.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Perhubungan Kab. Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan Lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kab. Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel C-T.32:

Tabel T-C.32  
**Usulan Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Dinas Perhubungan**

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal
1	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Jalan Gelap pada malam hari (Penerangan Jalan Umum)	Jalan PUK Kebasen Arah Sampang, Kab. Banyumas	Kebasen	Kebasen	20 lokasi	Dinas Perhubungan
2	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Jalan gelap pada malam hari (Penerangan Jalan Umum)	Jalan PUK Kebasen Arah Sampang, Kab. Banyumas	Kebasen	Tumiyang	20 lokasi	Dinas Perhubungan
3	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Jalan gelap pada malam hari (Penerangan Jalan Umum)	Jalan Raya Bangsa - Adisana, Kab. Banyumas	Kebasen	Adisana	20 lokasi	Dinas Perhubungan
4	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Jalan gelap pada malam hari (Penerangan Jalan Umum)	Jalan Raya Kalisalak - Sawangan, Kab. Banyumas	Kebasen	Sawangan	20 lokasi	Dinas Perhubungan
5	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Jalan gelap pada malam hari (Penerangan Jalan Umum)	Penerangan jalan raya Randegan Bangsa, Kab. Banyumas	Kebasen	Randegan	20 lokasi	Dinas Perhubungan
6	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Jalan gelap pada malam hari (Penerangan Jalan Umum)	Jalan Raya Kalisalak - Binangun, Kab. Banyumas	Kebasen	Kalisalak	40 lokasi	Dinas Perhubungan
7	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	LPJU jalan kabupaten desa datar	desa datar, Kab. Banyumas	Sumbang	Datar	1 Paket	Dinas Perhubungan
8	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	depan pasar desa dan sekolah dasar saat malam hari gelap dan rawan kecelakaan/kriminal	desa selanegara, Kab. Banyumas	Sumpiuh	Selanegara	10 buah	Dinas Perhubungan
9	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum ada LPJU sehingga membahayakan pengendara dan masyarakat sekitar	Kadus 1, Kab. Banyumas	Pekuncen	Candinegara	1 Paket	Dinas Perhubungan
10	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Kondisi ruas jalan kabupaten di sebelah utara kantor desa Kamulyan sangat gelap pada malam hari sepanjang kurang lebih 1000 m sehingga rawan akan tindak kejahatan	Desa Kamulyan, Kab. Banyumas	Tambak	Kamulyan	20 titik	Dinas Perhubungan
11	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Ruas jalan Kabupaten Prembun - Gebangsari sangat gelap pada malam	Desa Prembun, Kab. Banyumas	Tambak	Prembun	800 meter	Dinas Perhubungan

				hari sehingga rawan akan kecelakaan dan tindak kejahatan					
12	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Kondisi jalan ruas Kaliori - Suro sangat gelap pada malam hari sehingga rawan akan kecelakaan dan tindak kejahatan	Ruas jalan Kaliori - Suro, Kab. Banyumas	Kalibagor	Kaliori	50 titik	Dinas Perhubungan
13	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	LPJU Ketapang – Gunung Lurah Lewat Desa Jipang	PASIR KULON - JIPANG, Kab. Banyumas	Karangle was	Pasir Kulon	1 PAKET	Dinas Perhubungan
14	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penyediaan Rambu/Marka Jalan/Traffic Light/Flashing Jalan Kabupaten	Lampu traffic light, rambu dan marka jalan untuk perempatan balai desa Cikawung sangat dibutuhkan karena sering terjadi kecelakaan	Desa Cikawung, Kab. Banyumas	Pekuncen	Cikawung	1 Paket	Dinas Perhubungan
15	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Perlunya Penerangan Jalan/LPJU	Desa Banjaranyar, Kab. Banyumas	Sokaraja	Banjaranyar	1 Paket	Dinas Perhubungan
16	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum terpasangnya penerangan jalan di jalan kabupaten dari arah jalan nasional sampai dengan balai desa Buniayu yang mengakibatkan di malam hari rawan kecelakaan dan criminal	desa Buniayu, Kab. Banyumas	Tambak	Buniayu	52 titik	Dinas Perhubungan
17	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Penerangan Jalan Umum	Desa kemawi, Kab. Banyumas	Somagede	Kemawi	1 paket	Dinas Perhubungan
18	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum ada Penerangan sehingga perlu pembangunan LPJU	RW 01, 02, 08, 09, Kab. Banyumas	Ajibarang	Darmakradenan	30 TITIK	Dinas Perhubungan
19	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum ada Penerangan sehingga perlu pembangunan LPJU	Desa Dermaji, Kab. Banyumas	Lumbir	Dermaji	20 TITIK	Dinas Perhubungan
20	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum ada Penerangan Jalan sehingga perlu pembangunan LPJU	Panangkaban, Kab. Banyumas	Gumelar	Panangkaban	10 TITIK	Dinas Perhubungan
21	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum ada Penerangan sehingga perlu pembangunan LPJU	Karangkemojing, Kab. Banyumas	Gumelar	Karangkemojing	10 TITIK	Dinas Perhubungan
22	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum ada penerangan sehingga perlu pembangunan LPJU	kedungurang, Kab. Banyumas	Gumelar	Kedungurang	10 TITIK	Dinas Perhubungan
23	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Jalan kabupaten yang berada di wilayah desa Plana kec Somagede belum memiliki LPJU sehingga jika malam kondisi gelap dan dikhawatirkan menimbulkan kerawanan kriminalitas. untuk hal	Desa Plana, Kab. Banyumas	Somagede	Plana	50 titik	Dinas Perhubungan

				tersebut kami mengajukan kegiatan pengadaan LPJU untuk jalan kabupaten di wilayah desa PLana kec Somagede.					
24	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Lampu jalan di makam	RT 1 RW 6, Kab. Banyumas	Purwokerto Selatan	Karangkesem	6 Titik	Dinas Perhubungan
25	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Belum ada penerangan jalan kali Raden sehingga perlu dipasang LPJU	RT 1,2,3 RW 6 Kel. Pabuaran, Kab. Banyumas	Purwokerto Utara	Pabuaran	300 Meter	Dinas Perhubungan
26	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Kondisi jalan Ajibarang-Gumelar masih gelap karena masih banyak tempat yang belum ada LPJU nya	Jalan Gumelar-Ajibarang, Kab. Banyumas	Gumelar	Seluruh Kelurahan/Desa	100 titik	Dinas Perhubungan
27	Fraksi DPRD	Perhubungan	Penerangan Jalan / LPJU di Jalan Kabupaten	Penerangan jalan belum memadai	Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas	Purwokerto Barat	Seluruh Kelurahan/Desa	40 titik	Dinas Perhubungan
28	Kepala Desa Kedunggede	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Umum yang ada di wilayah Desa Kedunggede	Desa Kedunggede, Kab. Banyumas	Banyumas	Kedunggede		Dinas Perhubungan
29	Kepala Desa Karanglo	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Infrastruktur bangunan yang sudah lama serta mengurangi keindahan lingkungan	Losari Rt. 004 Rw. 002, Kab. Banyumas	Cilongok	Karanglo		Dinas Perhubungan
30	Kepala Desa Tlaga	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	JALAN RAWAN LONGOR DAN GELAP	DESA TLAGA, Kab. Banyumas	Gumelar	Tlaga		Dinas Perhubungan
31	Kepala Desa Samudra Kulon	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Rawan Kecelakaan	Samudra Kulon, Kab. Banyumas	Gumelar	Samudra Kulon		Dinas Perhubungan
32	Kepala Desa Jingsang	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Kalau malam gelap sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	Desa Jingsang, Kab. Banyumas	Ajibarang	Jingsang		Dinas Perhubungan
33	Kepala Desa Cilangkap	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal	JALAN MASIH BANYAK YANG PADAM KALO MALAM HARI	CILANGKAP, Kab. Banyumas	Gumelar	Cilangkap		Dinas Perhubungan

			(Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)						
34	Kepala Desa Kracak	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Ruas Jalan Gelap Sering Terjadi Kecelakaan Dan Tindak Kejahatan	Ruas Jalan Ajibarang Cibangkong, Ruas Jalan Ajibarang Parakan, Ruas Jalan Kracak Darmakeradenan, Kab. Banyumas	Ajibarang	Kracak		Dinas Perhubungan
35	Kepala Desa Karangke mojing	Kuangan	Penerangan Jalan Desa : Pembangunan/Perbaikan/Pemeliharaan (Bankeudes)	jalan gelap , sering terjadi kecelakaan	karangkemojing, Kab. Banyumas	Gumelar	Karangkemojing		Dinas Perhubungan
36	Kepala Desa Samudra	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Penerangan Jalan Umum Jalan Kabupaten; Lokasi Gelap Malam Hari	Jalan Raya Gumelar - Samudra - Patuguran, Kab. Banyumas	Gumelar	Samudra		Dinas Perhubungan
37	Kepala Desa Paningkaban	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Lampu penerangan jalan kabupaten	Desa Paningkaban, Kab. Banyumas	Gumelar	Paningkaban		Dinas Perhubungan
38	Kepala Desa Cipete	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Adanya keluhan dari masyarakat, karena masih banyak jalan Kabupaten yang masih gelap, belum ada penerangan jalan sama sekali	Jalan Syeh Abdusshomad, Kab. Banyumas	Cilongok	Cipete		Dinas Perhubungan
39	Kepala Desa Kalibenda	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Kondisi Jalan tidak ada penerangan, rawan kecelakaan, rawan kejahatan	Ruas jalan Kabupaten, Kab. Banyumas	Ajibarang	Kalibenda		Dinas Perhubungan
40	Kepala Desa Jompo Kulon	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	jalan menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan kecelakaan pada waktu malam hari	Jompo Kulon RW 02, Kab. Banyumas	Sokaraja	Jompo Kulon		Dinas Perhubungan
41	Kepala Desa Ciberung	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Jalan yang gelap di waktu malam	Ruas Jalan Ciberung Kracak dan Jalan Ciberung Cibangkong, Kab. Banyumas	Ajibarang	Ciberung		Dinas Perhubungan

42	Kepala Desa Babakan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur Kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan, Makam)	sering terjadi kecelakaan karena penerangan ( tiyang listrik tidak ada)	RW 11, Kab. Banyumas	Karangle was	Babakan		Dinas Perhubungan
43	Kepala Desa Darmakradenan	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Jalan kabupaten arah Gumelar banyak titik gelap	RW 02, Rw 01, Rw 08 dan Rw 09, Kab. Banyumas	Ajibarang	Darmakradenan		Dinas Perhubungan
44	Kepala Desa Randegan	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Kurangnya Penerangan Jalan Kabupaten Di wilayah Desa Randegan,Mengingat Kondisi Jalan Yang Berliku -liku dan Rawan Kecelakaan	Sepanjang Jalan Kabupaten, Kab. Banyumas	Kebasen	Randegan		Dinas Perhubungan
45	Kepala Desa Petahunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Drainase Jalan : Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Darurat	jalan pariwisata curug nangga, Kab. Banyumas	Pekuncen	Petahunan		Dinas Perhubungan
46	Kepala Desa Pamijen	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	masih minimnya penerangan jalan baik di jalan umum maupun jalan kabupaten di sekitar desa pamijen	RW 01 dan RW 02 Desa Pamijen, Kab. Banyumas	Baturraden	Pamijen		Dinas Perhubungan
47	Kepala Desa Cilongok	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	JL Kalimanggis Raya (Bentala-Cilongok) Merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan antar Desa namun saat malam minim penerangan/gelap sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal	JL Kalimanggis Raya, Kab. Banyumas	Cilongok	Cilongok		Dinas Perhubungan
48	Kepala Desa Gumelar Kidul	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Belum adanya jaringan listrik, listrik menyalur dari jaringan terdekat..	Desa Gumelar Kidul RT 8, 9 10 RW 01 dan RT 06, 08 RW 02, Kab. Banyumas	Tambak	Gumelar Kidul		Dinas Perhubungan
49	Kepala Desa Pancurendang	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Penerangan Jalan di jalan Kabupaten Ruas Pancurendang-Sawangan Kurang memadai	Desa Pancurendang, Kab. Banyumas	Ajibarang	Pancurendang		Dinas Perhubungan
50	Kepala Desa	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal	Banyaknya LPJU yang mati dan ada yang belum ada LPJU	Jalan Wiryo Suwito, Kab. Banyumas	Jatilawang	Karanganyar		Dinas Perhubungan



	Karangan yar		(Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)						
51	Kepala Desa Lesmana	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Belum ada penerangan jalan yang memadai, sehingga jalan kelihatan gelap rawan kecelakaan dan kejahatan	Ruas Jalan Kabupaten No 11, Jalan Pancuren - Lesmana, Kab. Banyumas	Ajibarang	Lesmana		Dinas Perhubungan
52	Kepala Desa Kebumen	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Minimnya Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten menimbulkan banyaknya kecelakaan lalu lintas dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat meresahkan masyarakat	1. Jalan Raya Baturraden Barat 2. Jalan Raya Kebumen 3. Jalan Lapangan 4. Jalan Kalamenta, Kab. Banyumas	Baturraden	Kebumen		Dinas Perhubungan
53	Kepala Desa Banjarsari Kulon	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Jalur evakuasi gelap	banjarsari kulon, Kab. Banyumas	Sumbang	Banjarsari Kulon		Dinas Perhubungan
54	Kepala Desa Tambaknegara	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Penerangan di Jalan Ekonomi	Desa Tambaknegara, Kab. Banyumas	Rawalo	Tambaknegara		Dinas Perhubungan
55	Kepala Desa Margasana	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	di jalan inpres Purwojati apabila malam hari gelap gulita tidak ada penerangan lampu jalan sama sekali	Jalan inpres purwojati ke arah desa Gentawangi kabupaten banyumas, Kab. Banyumas	Jatilawang	Margasana		Dinas Perhubungan
56	Kepala Desa Menganti	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Sepanjang Jalan Kabupaten Banjarparakan, Menganti, Karanganyar Tidak Ada Penerangan Jalan	Menganti-Karanganyar, Kab. Banyumas	Rawalo	Menganti		Dinas Perhubungan
57	Kepala Desa Kamulyan	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Jalan kabupaten disebelah utara kantor desa kamulyan tidak ada penerangan jalan sepanjang 400 m, apabila malam sangat gelap sehingga rawan kejahatan	Desa Kamulyan, Kab. Banyumas	Tambak	Kamulyan		Dinas Perhubungan
58	Kepala Desa Pengadegan	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Tidak penerangan jalan sehingga kondisi jalan gelap dan rawan kecelakaan	Kadus 2 dan Kadus 4, Kab. Banyumas	Wangon	Pengadegan		Dinas Perhubungan

59	Kepala Desa Sokawera	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Minimnya Penerangan Jalan di Wilayah Jalan Tasaba (Jalan Kabupaten)	Jalan Tasaba (Jalan Kabupaten), Kab. Banyumas	Patikraja	Sokawera		Dinas Perhubungan
60	Kepala Desa Datar	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Penerangan Jalan Tidak Maximal ( Rawan Kecelakaan )	Desa Datar, Kab. Banyumas	Sumbang	Datar		Dinas Perhubungan
61	Kepala Desa Prembun	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Kurangnya penerangan pada jalan Kabupaten sehingga sering terjadi Kecelakaan, dan indikasi kejahatan pada Malam hari	Jalan Kab. di desa Prembun, Kab. Banyumas	Tambak	Prembun		Dinas Perhubungan
62	Kepala Desa Kalisalak	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Jalan Gelap, Rawan Kecelakaan	Desa Kalisalak Kec. Kebasen Kab. Banyumas, Kab. Banyumas	Kebasen	Kalisalak		Dinas Perhubungan
63	Kepala Desa Karangsal am Kidul	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Belum ada Penerangan Jalan	Jl. Rajawali, Kab. Banyumas	Kedungbanteng	Karangsalam Kidul		Dinas Perhubungan
64	Kepala Desa Kotayasa	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Masih ada 16 pal yang belum ada LPJU	Jalan Banjarsari Limpakuwus, Kab. Banyumas	Sumbang	Kotayasa		Dinas Perhubungan
65	Kepala Desa Pesawahan	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Jalan gelap rawan kecelakan	Jalan Utama Desa Pesawahan, Kab. Banyumas	Rawalo	Pesawahan		Dinas Perhubungan
66	Kepala Desa Pekuncen	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Penerangan masih minim di jalan, resiko menimbulkan kecelakan	Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen, Kab. Banyumas	Pekuncen	Pekuncen		Dinas Perhubungan
67	Kepala Desa Semedo	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan Penyebrangan)	Sepanjang jalan kabupaten belum terdapat penerangan jalan sehingga mobilitas warga sedikit terhambat pada malam hari	Jalan kabupaten Semedo-Karangkemiri dan Jalan kabupaten Semedo-Petahunan, Kab. Banyumas	Pekuncen	Semedo		Dinas Perhubungan

68	Kepala Desa Somakaton	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan penyebrangan)	Jalan ramai kendaraan situasi gelap	Desa Somakaton, Kab. Banyumas	Somagede	Somakaton		Dinas Perhubungan
69	Kepala Desa Windujaya	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan penyebrangan)	Belum ada lampu penerangan jalan	Desa Windujaya Kadus 1, Kab. Banyumas	Kedungbanteng	Windujaya		Dinas Perhubungan
70	Kepala Desa Suro	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan penyebrangan)	masih kurangnya pencahayaan lampu penerangan jalan umum di jalan kabupaten, jadi masih ada beberapa jalan yg gelap	Jalan Kabupaten di Desa Suro, Kab. Banyumas	Kalibagor	Suro		Dinas Perhubungan
71	Kepala Desa Sumbang	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan penyebrangan)	LPJU Jl. Baturraden Timur	Jl. Baturraden Timur, Kab. Banyumas	Sumbang	Sumbang		Dinas Perhubungan
72	Kepala Desa Karangtalon Lor	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan penyebrangan)	Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum Masih terbatas sehingga ketika malam banyak area Jalan yang masih gelap	Desa Karangtalon Lor, Kab. Banyumas	Purwojati	Karangtalon Lor		Dinas Perhubungan
73	Kepala Desa Karangkemiri	Perhubungan	Pembangunan, Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terminal (Penerangan Jalan Umum, Halte, Jembatan penyebrangan)	Jalan Kabupaten di Desa Karangkemiri yang minim penerangan	LPJU Jalan Kabupaten di Desa Karangkemiri, Kab. Banyumas	Pekuncen	Karangkemiri		Dinas Perhubungan

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2022 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan pada **"Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan**

**Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia",** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

**Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
4. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
5. Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

### III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana, Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah Misi ke-6 (enam) yaitu: "Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan".

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatkan konektivitas wilayah	1. Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan 2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota 3. Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai

### **III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana, Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Perhubungan mempunyai 3 program dan 19 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat bidang dan sekretariat. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023  
Dinas Perhubungan  
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Banyumas**

Kode	Uraian/ Bidang/ Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Kejelasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
2																		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN DASAR</b>																	
2																	25.849.483,800	27.275.125,000
2																	14.723.627,873	14.736.113,800
2																	30.106,900	38.338,900
2																		
2	15	01	2.01	01	01												10,075,000	10,119,000
2	15	01	2.01	07	01												20,071,000	30,239,000
2	15	01	2.02														9,721,244,000	9,802,460,900
2	15	01	2.02	01													9,520,526,000	9,630,094,000
2	15	01	2.02	02													200,718,000	202,365,000
2	15	01	2.04														887,487,373	878,863,000
2	15	01	2.04	01													20,071,000	30,239,000
2	15	01	2.04	02													109,044,000	108,953,000
2	15	01	2.04	03													81,233,000	81,778,000
2	15	01	2.04	04													313,120,000	315,737,000



Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cetakan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Kekayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokal Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Kekayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah pengoperasian yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	7 Buah 70000 lembar	100 %	62,076,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	62,000,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi/konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi/pusat yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	12 kali	100 %	317,941,573	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	304,250,000
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah</b>												<b>261,115,000</b>
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah kendaraan dinas lapangan roda 2 yang tersedia Jumlah kendaraan dinas lapangan roda 4 yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 unit 1 unit	100 %	80,658,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	80,000,000
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	3 unit	100 %	23,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	23,200,000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	3 jenis	100 %	144,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	140,877,000
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	7 unit	100 %	88,208,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	88,830,000
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>												<b>3,163,152,000</b>
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tanggapan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	12 Bulan	100 %	365,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	368,350,000
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa perbaikan dan perlengkapan kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	40 jenis	100 %	20,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,230,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai non ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	112 orang	100 %	2,753,174,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,774,555,000
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>												<b>594,138,000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Kelas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokal Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tingkat Ulang	Target				
2	15	01	2.04	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan, Tajuk, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	10 unit	100 %	281.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	281.000.000
2	15	01	2.04	03	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	3 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	0
2	15	01	2.04	04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	10 unit	100 %	70.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	70.800.000
2	15	01	2.04	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah gedung pindah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 unit	100 %	202.944.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	202.944.000
2	15	01	2.04	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	3 unit	100 %	57.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	57.800.000
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANDUKTAN JALAN (LLAJ)</b>							<b>13.771.465.000</b>			<b>11.998.010.000</b>		
2	15	02	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>							<b>300.000.000</b>			<b>25.000.000</b>		
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kab. Banjumas yang disusun	Persentase Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	1 Dokumen	100 %	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	100 %	0
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah data jaringan LLAJ terupdate	Persentase Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Kab. Banjumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	11 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	100 %	25.000.000
2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Peralengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>							<b>11.181.200.000</b>			<b>9.578.890.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Kelemban Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokal Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	15	02	2.02	01	Rembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan kelengkapan jalan	Jumlah APJ baru yang dipasang Jumlah halte/ Shelter bus baru terbangun Jumlah rest area yang dibangun	Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan	Kab. Banyumas, Jatilawang, Karanganyar Kab. Banyumas, Ruwali, Purwokerto Kab. Banyumas, Tambak, Pembun Kab. Banyumas, Pekuroran, Pekuroran Kab. Banyumas, Pekuroran, Semadi Kab. Banyumas, Clongok, Clongok Kab. Banyumas, Karangasem, Batatan Kab. Banyumas, Sokaraja, Lambarang Kab. Banyumas, Sembawang, Sembawang Wetan Kab. Banyumas, Sumbang, Datar Kab. Banyumas, Sumbang, Banjaran, Kulan Kab. Banyumas, Sumbang, Klatayan Kab. Banyumas, Batunaden, Pamijen Kab. Banyumas, Kadungbarong, Wondajaya Kab. Banyumas, Purwokerto, Selatan, Tarung	50 % 20 unit 0 unit	50 %	6,540,187,000	PENDAPKIRAN ASLI DASRAN (PAD)	Persentase kelengkapan kelengkapan jalan	50 %	4,734,437,000

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Beban Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	Jumlah APGL yang terpasang Jumlah barikade yang tersedia Jumlah semir lumpur yang terpasang Jumlah Delimitator yang terpasang Jumlah Fasilitas Perbukit perengkapan jalan yang terpasang Jumlah marka jalan yang terpasang Jumlah mobil tangga yang tersedia Jumlah pagar pengaman jalan (Guardrail) yang terpasang Jumlah Pita pengarah yang terpasang Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang Jumlah road barrier yang tersedia Jumlah trafficone yang tersedia	Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan	Kab. Bangunmas, Purwokerto Selatan, Tanjung	36 %	5 unit 50 unit 10 unit 200 unit 1 paket 3500 m <sup>2</sup> 0 unit 160 m 150 m 160 unit 50 unit 50 unit	36 %	2,071,087,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	36 %	2,063,575,000
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Jalan	Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	Jumlah Alat Perenangan Jalan (APJ) yang terpelihara Jumlah Retrot dan Materialisi Alat Perenangan Jalan (APJ) yang dikembalikan	Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan	Kab. Bangunmas, Purwokerto Selatan, Tanjung	36 %	1000 unit 230 unit	36 %	2,448,868,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	36 %	2,448,585,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	Jumlah fasilitas perengkapan jalan yang dipelihara	Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan	Kab. Bangunmas, Purwokerto Selatan, Tanjung	36 %	12 unit	36 %	301,077,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	36 %	301,593,000
2	15	02	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>						836,971,000						862,294,000	
2	15	02	2.03	02	Rehabilitasi Gedung Terminal	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	Jumlah gedung terminal penumpang Tipe C yang dibangun	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	Kab. Bangunmas, Purwokerto Selatan, Tanjung	85,3 %	1 unit	85,3 %	48,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	85,3 %	50,000,000
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	Jumlah sarana prasarana pendukung terminal yang dikembangkan	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	Kab. Bangunmas, Purwokerto Selatan, Tanjung	85,3 %	0 unit	85,3 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	85,3 %	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Ketersediaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokal Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Ketersediaan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Fasilitas Utama dan Perhubungan	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	Jumlah sarana prasarana utama dan pendukung terminal yang dipelihara Jumlah Terminal Remumpang Tipe-C yang dipelihara	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	Kab. Banjarnegara, Cilongok, Kebanagung, Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	85,5 %	4 unit 4 terminal	85,5 %	798.141.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	85,5 %	842.294.000
2	13	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>							<b>180.897.000</b>				<b>182.894.000</b>	
2	13	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase perbaikan yang beroperasi sesuai ketentuan	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir secara elektronik yang diterbitkan	persentase perbaikan yang beroperasi sesuai ketentuan	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	1 Dokumen	100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perbaikan yang beroperasi sesuai ketentuan	100 %	30.000.000
2	13	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perbaikan yang beroperasi sesuai ketentuan	Jumlah izin penyelenggaraan parkir yang diawasi	persentase perbaikan yang beroperasi sesuai ketentuan	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	51 Dokumen	100 %	150.897.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perbaikan yang beroperasi sesuai ketentuan	100 %	152.894.000
2	13	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>							<b>593.966.000</b>				<b>597.239.000</b>	
2	13	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	Jumlah alat uji PDB baru yang tersedia	persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	95 %	3 unit	95 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	95 %	230.000.000
2	13	02	2.05	04	Penyediaan Buah Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	Jumlah buah lulus uji PDB yang tersedia	persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	95 %	11300 buah	95 %	393.966.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	95 %	397.239.000
2	13	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	95 %	0 unit	95 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	95 %	0
2	13	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>							<b>742.837.000</b>				<b>745.845.000</b>	
2	13	02	2.06	01	Realisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRL	Jumlah dokumen kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun Jumlah Survey LLAJ yang dilaksanakan	persentase pelaksanaan MRL	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 Dokumen 1 Survei	100 %	80.322.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan MRL	100 %	81.377.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Berlingkasan Jalan dalam rangka Manajemen dan Kebijakan Lalu Lintas	Persentase pelaksanaan MRL	Jumlah ATCS/APRL yang dipasang	Jumlah ATCS/APRL yang terpasang	persentase pelaksanaan MRL	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	8 unit 1 unit	100 %	307,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan MRL	100 %	333,562,000
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRL	Jumlah peserta pendidikan keselamatan dan kewilayahan lalu lintas	persentase pelaksanaan MRL	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	200 orang	100 %	100,358,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan MRL	100 %	101,167,000	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRL	Jumlah inspeksi lokasi keselamatan yang terdapat Jumlah kegiatan PSLL yang terlaksana Jumlah operasi penertiban parkir yang terlaksana	persentase pelaksanaan MRL	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	3 kegiatan 100 kegiatan 15 kegiatan	100 %	200,702,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan MRL	100 %	232,179,000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRL	Jumlah dokumen forum LLAJ yang tersusun Jumlah rapat Forum LLAJ yang terlaksana	persentase pelaksanaan MRL	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 Dokumen 2 kali	100 %	50,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan MRL	100 %	50,598,000	
2	15	02	2.07		<b>Penyelesaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>50,000,000</b>					<b>50,000,000</b>		
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Revisi Hasil Andalalin	Persentase pelaksanaan MRL	Jumlah rekomendasi hasil andalalin diawasi	Persentase Pelaksanaan MRL	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 rekomendasi	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan MRL	100 %	25,000,000	
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase pelaksanaan MRL	Jumlah penyelesaian dokumen hasil andalalin diawasi	Persentase Pelaksanaan MRL	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 Dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan MRL	100 %	25,000,000	
2	15	02	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>						<b>50,175,000</b>					<b>50,594,000</b>		
2	15	02	2.08	02	Relaksasi Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Relaksasi Uji Berhala Sertifikasi Bermotor	Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	Jumlah operasi uji laik lenyap yang dilaksanakan Jumlah pemantauan dan inspeksi perbergkalan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	99 %	23 kegiatan 9 kegiatan	99 %	50,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	99 %	50,594,000	
2	15	02	2.09		<b>Pengujian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>20,616,000</b>					<b>22,056,000</b>		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah orang terangkut angkutan umum Jumlah siswa yang terlayani angkutan lin eksklusif gratis	Persentase jumlah Angkutan Umum (angkutan, angkot, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Kab. Banjarnegara, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	200 orang 4000 siswa	100 %	20,616,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	100 %	22,056,000	
2	15	02	2.11		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>					<b>0</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Kekayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah dokumen trayek pedesaan yang tersusun	Persentase jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Kab: Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	100 %	0
2	15	02	2.12		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					0			0				
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Keselamatan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah dokumen trayek pedesaan yang tersusun	Persentase jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Kab: Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	100 %	0
2	15	02	2.13		<b>Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					0			0				
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Keselamatan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah dokumen wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi yang disusun	Persentase jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Kab: Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	100 %	0
2	15	02	2.14		<b>Pembelian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					35.000.000			50.000.000				
2	15	02	2.14	01	fasilitas Pemenuhan Persyaratan Penjualan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Keselamatan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah pelaku usaha angkutan umum yang difasilitasi perizinan	Persentase jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Kab: Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	T1 pelaku usaha	100 %	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	100 %	50.000.000
2	15	02	2.18		<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					0			0				
2	15	02	2.18	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang tersusun	Persentase jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Kab: Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutan, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	100 %	0
2	15	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN</b>					355.000.000			355.000.000				
2	15	03	2.03		<b>Pembelian Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sengal dan Demas sesuai dengan Domisili Orang Penerimaan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha</b>					40.000.000			40.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 03 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	Jumlah pelaku usaha jasa usaha angkutan sungai diawasi	Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	42.85 %	4 pelaku usaha	42.85 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	42.85 %	40,000,000
2 15 03 2.08	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</b>							<b>10,000,000</b>						<b>10,000,000</b>
2 15 03 2.08 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	Jumlah surat kecakapan pengoperasian kapal yang difasilitasi	Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	42.85 %	4 Buah	42.85 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	42.85 %	10,000,000
2 15 03 2.13	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>							<b>305,000,000</b>						<b>305,000,000</b>
2 15 03 2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	Jumlah dermaga sungai yang terbangun Jumlah dokumen rencana pembangunan dermaga sungai	Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	42.85 %	0 unit 1 Dokumen	42.85 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	42.85 %	500,000,000
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	Jumlah dermaga/pelabuhan/halte sungai yang dioperasikan dan dipelihara	Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	42.85 %	3 unit	42.85 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan prasarana Angkutan Sungai	42.85 %	5,000,000
<b>TOTAL</b>								<b>28,849,493,000</b>					<b>27,275,125,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Bencana Tahun 2022					Cetakan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokas Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2	15																		
2	15	01																	
2	15	01	2.06																
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Elemen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	15 jenis	100 %	10,464,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		10,464,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralat dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralat dan perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	10 jenis	100 %	23,627,430	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		23,627,430
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralat Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralat rumah tangga yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	15 jenis	100 %	23,235,570	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		23,235,570
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah logistik yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	12 Bulan	100 %	155,869,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		155,869,000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	13 Buah 8000 lembar	100 %	9,990,700	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		9,990,700
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Saran Koordinasi dan Komunikasi SOPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi/konultasi dan pertemuan tingkat provinsi/kabupaten yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	12 kali	100 %	37,621,300	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		37,621,300
2	15	01	2.07																
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Meubelir Kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	4 Unit	100 %	11,290,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %		11,290,000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralat dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah peralat dan perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	4 jenis	100 %	43,047,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %		43,047,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Praktisi Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Kekayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terselesaikan	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	5 Unit	100 %	30,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	30,250,000
2	15	01	2.08		<b>Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>270.106.900</b>				<b>270.106.900</b>		
2	15	01	2.08	02	Pengediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah langganan surat kabar, laporan, internet, baterai, dan air yang dikelola	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	12 Bulan	100 %	77,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	77,070,000
2	15	01	2.08	04	Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai non ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	8 orang	100 %	181,058,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	181,058,800
2	15	01	2.09		<b>Perbaikan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>128.150.000</b>				<b>128.150.000</b>		
2	15	01	2.09	02	Pengediaan Jasa Perbaikan, Saje, Perbaikan, Rajut, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang diperbaiki	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	10 Unit	100 %	89,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	89,200,000
2	15	01	2.09	05	Perbaikan Mebel	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah mebel yang diperbaiki	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 Unit	100 %	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	7,500,000
2	15	01	2.09	06	Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang diperbaiki	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	4 Unit	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	2,000,000
2	15	01	2.09	08	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah gedung pemilih yang diperbaiki	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 Unit	100 %	23,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	23,750,000
2	15	01	2.09	11	Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperbaiki	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	Kab. Bangumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 Unit	100 %	5,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	5,700,000
<b>TOTAL</b>												<b>747.155.900</b>				<b>759.881.900</b>	

RENJA TAHUN 2022 DINAS PERHUBUNGAN

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

**Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
<b>2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN</b>						24,158,048,059		30,378,432,000		30,578,432,000		85,114,912,059	PAD		
<b>2.15.0.00.0.00.01.01 DINAS PERHUBUNGAN</b>						23,198,169,712		28,849,493,000		29,040,020,000		81,087,682,712	PAD		
Meningkatkan konektivitas wilayah			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		0.6865	23,198,169,712	0.8275	28,849,493,000	0.89	29,040,020,000	0.89	81,087,682,712	PAD	iku, ikk,	
	Meningkatnya konektivitas angkutan sungai		Indeks konektivitas angkutan sungai		0.125	0	0.375	355,000,000	0.5	570,000,000	0.5	925,000,000	PAD	ikk,	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				0		355,000,000		570,000,000		925,000,000	PAD		
			Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	%	5	0	42,85	355,000,000	57,14	570,000,000	57,14	925,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha													
			Jumlah izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai yang dikeluarkan	ijin	0	0	4	40,000,000	4	45,000,000	8	85,000,000	PAD		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau													
					0		40,000,000		45,000,000		85,000,000	PAD			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah pelaku usaha jasa usaha angkutan sungai diawasi	pelaku usaha	0	0	4	40,000,000	4	45,000,000	4	85,000,000	PAD		
		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				0	10,000,000		15,000,000		25,000,000	PAD			
			Jumlah surat kecakapan dan kelayakan kapal yang di tetapkan	berkas	0	0	4	10,000,000	4	15,000,000	8	25,000,000	PAD		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				0	10,000,000		15,000,000		25,000,000	PAD			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah surat kecakapan pengoperasian kapal yang difasilitasi	Buah	0	0	4	10,000,000	4	15,000,000	8	25,000,000	PAD		
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau													
			Jumlah dermaga yang dibangun dan dioperasikan	Unit	0	0	3	305,000,000	3	510,000,000	3	815,000,000	PAD		
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau													
						0		200,000,000		400,000,000		600,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Dokumen Rencana pembangunan dermaga sungai	Dokumen	0	0	1	200,000,000	0	0	1	200,000,000	PAD		
			Jumlah prasarana dermaga sungai yang terbangun	Unit	0	0	0	0	1	400,000,000	1	400,000,000	PAD		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau													
			Jumlah dermaga/pelabuhan/halte sungai yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	0	0	3	105,000,000	3	110,000,000	3	215,000,000	PAD		
	Meningkatnya konektivitas angkutan jalan		Indeks konektivitas angkutan jalan		0.78	13,962,684,056	0.8	16,009,575,000	0.8	16,091,704,000	0.8	46,063,963,056	PAD	ikk,	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN				1,101,702,375		1,286,547,025		1,361,589,000		3,749,838,400	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
			Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%	66.67	623,528,500	83.3	836,971,000	100	692,294,000	100	2,152,793,500	PAD			
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				623,528,500		836,971,000				692,294,000		2,152,793,500	PAD	
			Jumlah terminal penumpang tipe C yang dikelola	terminal	3	623,528,500	4	836,971,000	6	692,294,000	6	2,152,793,500	PAD			
		Pembangunan Gedung Terminal				0		48,830,000				50,000,000		98,830,000	PAD	
			Jumlah gedung terminal penumpang Tipe C yang dibangun	Unit	0	0	1	48,830,000	2	50,000,000	3	98,830,000	PAD			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				623,528,500		788,141,000				642,294,000		2,053,963,500	PAD	
			Jumlah sarana prasarana utama dan pendukung	Unit	3	497,036,500	4	638,141,000	6	477,294,000	6	1,612,471,500	PAD			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Terminal yang dipelihara												
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di pelihara	terminal	3	126,492,000	4	150,000,000	6	165,000,000	6	441,492,000	PAD		
			Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	%	95	333,673,875	95	393,966,000	96	597,259,000	96	1,324,898,875	PAD		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				333,673,875		393,966,000		597,259,000		1,324,898,875	PAD		
			Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor yang terlayani	Unit	11500	333,673,875	11500	393,966,000	12000	597,259,000	35000	1,324,898,875	PAD		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala				0		0		200,000,000		200,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Kendaraan Bermotor													
			Jumlah alat uji PKB yang tersedia	Set	0	0	0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	PAD		
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				333,673,875		393,966,000		397,259,000		1,124,898,875	PAD		
			Jumlah bukti lulus uji PKB yang tersedia	berkas	11500	333,673,875	11500	393,966,000	12000	397,259,000	57250	1,124,898,875	PAD		
			Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	%	100	144,500,000	100	55,610,025	100	72,036,000	100	272,146,025	PAD		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang				144,500,000		20,610,000		22,036,000		187,146,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Unit	1676	144,500,000	1686	20,610,000	1706	22,036,000	1706	187,146,000	PAD		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				144,500,000		20,610,000		22,036,000		187,146,000	PAD		
			Jumlah orang terangkut angkutan umum	Orang	0	0	200	10,000,000	200	10,000,000	400	20,000,000	PAD		
			Jumlah siswa yang terlayani angkutan bis sekolah gratis	Siswa	4000	144,500,000	4000	10,610,000	4000	12,036,000	12000	167,146,000	PAD		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0		35,000,025		50,000,000		85,000,025	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah ijin trayek lintas dalam 1 (Satu) daerah kabupaten yang diterbitkan	ijin	0	0	160	35,000,025	180	50,000,000	340	85,000,025	PAD		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah pelaku usaha angkutan umum yang	pelaku usaha	0	0	71	35,000,025	72	50,000,000	72	85,000,025	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			difasilitasi perizinan												
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,860,981,681		14,723,027,975		14,730,115,000		42,314,124,656	PAD		
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	25,500,000	100	30,106,000	100	30,358,000	100	85,964,000	PAD		
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,500,000		30,106,000		30,358,000		85,964,000	PAD		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan	Dokumen	4	25,500,000	4	30,106,000	4	30,358,000	12	85,964,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Evaluasi Kinerja yang disusun												
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	8,500,000	3	10,035,000	3	10,119,000	9	28,654,000	PAD		
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	17,000,000	1	20,071,000	1	20,239,000	3	57,310,000	PAD		
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	7,996,197,938	100	9,721,244,000	100	9,802,489,000	100	27,519,930,938	PAD		
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,996,197,938		9,721,244,000		9,802,489,000		27,519,930,938	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	7,996,197,938	3	9,721,244,000	3	9,802,489,000	3	27,519,930,938	PAD		
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7,796,197,938		9,520,526,000		9,600,094,000		26,916,817,938	PAD		
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	80	7,796,197,938	80	9,520,526,000	80	9,600,094,000	80	26,916,817,938	PAD		
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				200,000,000		200,718,000		202,395,000		603,113,000	PAD		
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	15	200,000,000	15	200,718,000	15	202,395,000	15	603,113,000	PAD		
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	845,106,000	100	945,640,000	100	855,253,000	100	2,645,999,000	PAD		
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				257,997,500		347,075,000		261,115,000		866,187,500	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Pemerintah Daerah													
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	4	257,997,500	4	347,075,000	4	261,115,000	4	866,187,500	PAD		
		X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		90,639,000		0		90,639,000	PAD		
			Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Roda 4 yang tersedia	Unit	0	0	1	40,639,000	0	0	1	40,639,000	PAD		
			Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Roda 2 yang tersedia	Unit	0	0	2	50,000,000	0	0	2	50,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				25,000,000		23,500,000		25,299,000		73,799,000	PAD		
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	3	25,000,000	3	23,500,000	3	25,299,000	9	73,799,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				144,250,000		144,730,000		145,977,000		434,957,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	18	144,250,000	18	144,730,000	18	145,977,000	54	434,957,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88,747,500		88,206,000		89,839,000		266,792,500	PAD		
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	16	88,747,500	16	88,206,000	16	89,839,000	48	266,792,500	PAD		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				587,108,500		598,565,000		594,138,000		1,779,811,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	587,108,500	4	598,565,000	4	594,138,000	4	1,779,811,500	PAD		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				280,000,000		281,005,000		283,353,000		844,358,000	PAD		
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	39	280,000,000	39	281,005,000	39	283,353,000	39	844,358,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69,998,500		79,600,000		70,836,000		220,434,500	PAD		
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	69,998,500	10	79,600,000	10	70,836,000	30	220,434,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				199,950,000		200,667,000		202,344,000		602,961,000	PAD		
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	199,950,000	2	200,667,000	2	202,344,000	2	602,961,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37,160,000		37,293,000		37,605,000		112,058,000	PAD		
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	37,160,000	5	37,293,000	5	37,605,000	15	112,058,000	PAD		
			Cakupan Pelayanan Administrasi	%	100	3,994,177,743	100	4,026,037,975	100	4,042,015,000	100	12,062,230,718	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Umum Perangkat Daerah												
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				868,463,550		887,487,575		878,863,000		2,634,814,125	PAD		
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	868,463,550	6	887,487,575	6	878,863,000	6	2,634,814,125	PAD		
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20,000,000		20,071,000		20,239,000		60,310,000	PAD		
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	20,000,000	1	20,071,000	1	20,239,000	1	60,310,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				108,654,000		109,044,000		109,955,000		327,653,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	108,654,000	4	109,044,000	4	109,955,000	12	327,653,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65,000,000		65,233,000		65,778,000		196,011,000	PAD		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	4	65,000,000	4	65,233,000	4	65,778,000	12	196,011,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				312,000,000		313,120,000		315,737,000		940,857,000	PAD		
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	312,000,000	12	313,120,000	12	315,737,000	36	940,857,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				61,854,800		62,076,000		62,595,000		186,525,800	PAD		
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	7	47,854,800	7	47,976,000	7	48,412,700	21	144,243,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	70000	14,000,000	70000	14,100,000	70000	14,182,300	210000	42,282,300	PAD		
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300,954,750		317,943,575		304,559,000		923,457,325	PAD		
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	300,954,750	12	317,943,575	12	304,559,000	36	923,457,325	PAD		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,125,714,193		3,138,550,400		3,163,152,000		9,427,416,593	PAD		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3,125,714,193	3	3,138,550,400	3	3,163,152,000	3	9,427,416,593	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				363,998,993		365,305,000		368,358,000		1,097,661,993	PAD		
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	363,998,993	12	365,305,000	12	368,358,000	36	1,097,661,993	PAD		
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20,000,000		20,071,000		20,239,000		60,310,000	PAD		
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	20,000,000	1	20,071,000	1	20,239,000	3	60,310,000	PAD		
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,741,715,200		2,753,174,400		2,774,555,000		8,269,444,600	PAD		
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	112	2,741,715,200	112	2,753,174,400	112	2,774,555,000	112	8,269,444,600	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		0.74	9,235,485,656	0.74	12,484,918,000	0.74	12,378,316,000	0.74	34,098,719,656	PAD		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				9,235,485,656		12,484,918,000		12,378,316,000		34,098,719,656	PAD		
			Persentase implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	%	0	0	100	300,000,000	100	25,000,000	100	325,000,000	PAD		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0		300,000,000		25,000,000		325,000,000	PAD		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas yang ditetapkan	Dokumen	0	0	1	300,000,000	0	25,000,000	1	325,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0	300,000,000			0	300,000,000	PAD			
			Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang disusun	Dokumen	0	0	1	300,000,000	0	0	1	300,000,000	PAD		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0	0			25,000,000	25,000,000	PAD			
			Jumlah data jaringan LLAJ tersusun	Dokumen	0	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	PAD		
			Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	%	53	8,306,507,000	56	11,161,209,000	59	11,320,885,000	59	30,788,601,000	PAD		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				8,306,507,000	11,161,209,000			11,320,885,000	30,788,601,000	PAD			
			Jumlah fasilitas perhubungan dan perlengkapan	Unit	1000	8,306,507,000	1000	11,161,209,000	1000	11,320,885,000	3000	30,788,601,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			jalan yang terpasang												
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3,738,400,000		6,340,197,000		6,484,332,000		16,562,929,000	PAD			
			Jumlah Halte/ Shelter bus baru terbangun	Unit	24	850,000,000	20	1,000,000,000	22	1,144,135,000	66	2,994,135,000	PAD		
			Jumlah APJ baru yang dipasang	Unit	309	2,888,400,000	393	5,340,197,000	400	5,340,197,000	1102	13,568,794,000	PAD		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2,063,657,500		2,071,067,000		2,063,375,000		6,198,099,500	PAD			
			Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	Unit	532	736,952,500	165	198,000,000	165	198,000,000	862	1,132,952,500	PAD		
			Jumlah APILL yang terpasang	Unit	1	408,552,500	5	402,000,000	5	377,000,000	11	1,187,552,500	PAD		
			Jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) yang terpasang	m	0	0	160	200,000,000	160	200,000,000	320	400,000,000	PAD		
			jumlah cermin tikungan yang terpasang	Unit	0	0	10	45,000,000	10	45,000,000	20	90,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			jumlah deliniator yang terpasang	Unit	0	0	200	80,000,000	200	80,000,000	400	160,000,000	PAD		
			jumlah pita penggaduh yang terpasang	m	0	0	150	56,250,000	150	56,250,000	300	112,500,000	PAD		
			Jumlah trafficone yang tersedia	Unit	0	0	50	15,125,000	50	15,125,000	100	30,250,000	PAD		
			Jumlah barikade yang tersedia	Unit	0	0	50	125,000,000	50	125,000,000	100	250,000,000	PAD		
			jumlah road barrier yang tersedia	Unit	0	0	50	15,000,000	100	30,000,000	150	45,000,000	PAD		
			Jumlah fasilitas pendukung perlengkapan jalan yang terpasang	Paket	0	0	1	94,692,000	1	97,000,000	2	191,692,000	PAD		
			Jumlah marka jalan yang terpasang	m2	3415	918,152,500	3500	840,000,000	3500	840,000,000	10415	2,598,152,500	PAD		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				2,249,500,000		2,448,868,000		2,469,585,000		7,167,953,000	PAD		
			Jumlah Alat Penerangan Jalan (APJ) yang terpelihara	Unit	1000	1,249,500,000	1000	1,448,868,000	1000	1,469,585,000	3000	4,167,953,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Retrovit dan Meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ) yang dilaksanakan	Unit	227	1,000,000,000	250	1,000,000,000	300	1,000,000,000	777	3,000,000,000	PAD		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				254,949,500		301,077,000		303,593,000		859,619,500	PAD		
			Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara	Unit	12	254,949,500	12	301,077,000	12	303,593,000	36	859,619,500	PAD		
			Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	227,500,000	100	180,897,000	100	182,994,000	100	591,391,000	PAD		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				227,500,000		180,897,000		182,994,000		591,391,000	PAD		
			Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	ijin	51	227,500,000	51	180,897,000	51	182,994,000	153	591,391,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik			0		30,000,000		30,000,000		60,000,000	PAD			
			Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir secara elektronik yang difasilitasi	Dokumen	0	0	1	30,000,000	2	30,000,000	3	60,000,000	PAD		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan				227,500,000		150,897,000		152,994,000		531,391,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah izin penyelenggaraan parkir yang diawasi	Dokumen	51	227,500,000	51	150,897,000	51	152,994,000	153	531,391,000	PAD		
			Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalulintas	%	98	42,496,281	99	50,175,000	100	50,594,000	100	143,265,281	PAD		
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				42,496,281		50,175,000		50,594,000		143,265,281	PAD		
			Jumlah audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	Keg	30	42,496,281	35	50,175,000	43	50,594,000	108	143,265,281	PAD		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala				42,496,281		50,175,000		50,594,000		143,265,281	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Kendaraan Bermotor													
			Jumlah operasi uji laik kendaraan yang dilaksanakan	Keg	30	42,496,281	35	40,175,000	43	40,594,000	108	123,265,281	PAD		
			Jumlah Pemantauan dan inspeksi perbengkelan yang dilaksanakan	Keg	0	0	9	10,000,000	9	10,000,000	18	20,000,000	PAD		
			Persentase pelaksanaan MRLL	%	100	658,982,375	100	792,637,000	100	798,843,000	100	2,250,462,375	PAD		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				658,982,375		742,637,000		748,843,000		2,150,462,375	PAD		
			Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Keg	5	658,982,375	5	742,637,000	5	748,843,000	15	2,150,462,375	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				76,499,375		90,322,000		91,077,000		257,898,375	PAD		
			Jumlah dokumen kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersusun	Dokumen	2	56,500,000	2	60,000,000	2	60,000,000	6	176,500,000	PAD		
			Jumlah Survey LLAJ yang dilaksanakan	survei	1	19,999,375	1	30,322,000	1	31,077,000	3	81,398,375	PAD		
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				254,998,750		301,075,000		303,592,000		859,665,750	PAD		
			Jumlah ATCS/APIII yang dipelihara	Unit	8	254,998,750	8	251,075,000	8	253,592,000	8	759,665,750	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah ATCS/APILL Terpasang	Unit	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	PAD		
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				85,000,000		100,359,000		101,197,000		286,556,000	PAD		
			Jumlah peserta pembinaan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Orang	200	85,000,000	200	100,359,000	200	101,197,000	600	286,556,000	PAD		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				199,984,250		200,702,000		202,379,000		603,065,250	PAD		
			Jumlah inspeksi lokasi keselamatan yang terdata	Keg	3	6,000,000	3	6,000,000	3	6,000,000	9	18,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah kegiatan P5LL yang terlaksana	Keg	100	124,139,250	110	124,857,000	115	126,534,000	325	375,530,250	PAD		
			jumlah operasi penertiban parkir yang terlaksana	Keg	12	69,845,000	15	69,845,000	20	69,845,000	47	209,535,000	PAD		
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				42,500,000		50,179,000		50,598,000		143,277,000	PAD		
			Jumlah rapat forum LLAJ yang terlaksana	Kali	2	42,500,000	2	25,000,000	2	25,000,000	6	92,500,000	PAD		
			Jumlah dokumen forum LLAJ yang tersusun	Dokumen	0	0	2	25,179,000	2	25,598,000	4	50,777,000	PAD		
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD		
			Jumlah persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan	Dokumen	0	0	4	50,000,000	4	50,000,000	8	100,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD		
			Jumlah rekomendasi hasil andalalin yang disusun	rekome ndasi	0	0	2	25,000,000	2	25,000,000	4	50,000,000	PAD		
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD		
			Jumlah persetujuan dokumen hasil andalalin diawasi	Dokum en	0	0	2	25,000,000	2	25,000,000	4	50,000,000	PAD		
<b>2.15.0.00.0.00.01.02 UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>						291,907,947		747,155,000		750,681,000		1,789,743,947	PAD		
Meningkatkan konektivitas wilayah			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		0.6865	291,907,947	0.8275	747,155,000	0.89	750,681,000	0.89	1,789,743,947	PAD	iku, ikk,	
	Meningkatnya konektivitas angkutan sungai		Indeks konektivitas angkutan sungai		0.125	6,000,002	0.375	202,607,000	0.5	202,607,000	0.5	411,214,002	PAD	ikk,	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,000,002		202,607,000		202,607,000		411,214,002	PAD		
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	0	0	100	125,537,000	100	125,537,000	100	251,074,000	PAD		
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		86,587,000		86,587,000		173,174,000	PAD		
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	0	0	3	86,587,000	3	86,587,000	3	173,174,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				0		11,290,000		11,290,000		22,580,000	PAD		
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	0	0	4	11,290,000	4	11,290,000	8	22,580,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		45,047,000		45,047,000		90,094,000	PAD		
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	0	0	4	45,047,000	4	45,047,000	8	90,094,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		30,250,000		30,250,000		60,500,000	PAD		
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0	5	30,250,000	5	30,250,000	10	60,500,000	PAD		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				0		38,950,000		38,950,000		77,900,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Pemerintahan Daerah													
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	0	0	4	38,950,000	4	38,950,000	4	77,900,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				0	7,500,000		7,500,000		15,000,000	PAD			
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	0	0	2	7,500,000	2	7,500,000	4	15,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0	2,000,000		2,000,000		4,000,000	PAD			
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	4	2,000,000	4	2,000,000	8	4,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	23,750,000		23,750,000		47,500,000	PAD			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	0	0	2	23,750,000	2	23,750,000	2	47,500,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		5,700,000		5,700,000		11,400,000	PAD		
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	2	5,700,000	2	5,700,000	4	11,400,000	PAD		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6,000,002	100	77,070,000	100	77,070,000	100	160,140,002	PAD		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				6,000,002		77,070,000		77,070,000		160,140,002	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Pemerintahan Daerah													
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	6,000,002	1	77,070,000	1	77,070,000	1	160,140,002	PAD		
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6,000,002		77,070,000		77,070,000		160,140,002	PAD		
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	6,000,002	12	77,070,000	12	77,070,000	36	160,140,002	PAD		
	Meningkatnya konektivitas angkutan jalan		Indeks konektivitas angkutan jalan		0.78	285,907,945	0,8	544,548,000	0,8	548,074,000	0,8	1,378,529,945	PAD	ikk,	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				285,907,945		544,548,000		548,074,000		1,378,529,945	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		DAERAH KABUPATEN/KOTA													
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	0	0	100	89,200,000	100	89,200,000	100	178,400,000	PAD		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	0	0	1	89,200,000	1	89,200,000	1	178,400,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas													

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	0	0	10	89,200,000	10	89,200,000	10	178,400,000	PAD		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	285,907,945	100	455,348,000	100	458,874,000	100	1,200,129,945	PAD		
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				165,259,945		262,311,200		265,837,200		693,408,345	PAD		
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	165,259,945	6	262,311,200	6	265,837,200	6	693,408,345	PAD		
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga				7,000,000		10,464,000		10,464,000		27,928,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		n Bangunan Kantor													
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	7,000,000	1	10,464,000	1	10,464,000	1	27,928,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25,500,000		25,627,430		25,627,430		76,754,860	PAD		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	25,500,000	4	25,627,430	4	25,627,430	4	76,754,860	PAD		
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1,500,000		23,235,570		23,235,570		47,971,140	PAD		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	2	1,500,000	3	23,235,570	3	23,235,570	3	47,971,140	PAD		
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan				106,299,945		155,363,000		158,889,000		420,551,945	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	106,299,945	12	155,363,000	12	158,889,000	36	420,551,945	PAD		
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10,000,000		9,999,700		9,999,700		29,999,400	PAD		
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	15	6,000,000	15	6,000,000	15	6,000,000	45	18,000,000	PAD		
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	8000	4,000,000	8000	3,999,700	8000	3,999,700	24000	11,999,400	PAD		
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14,960,000		37,621,500		37,621,500		90,203,000	PAD		
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat	Kali	12	14,960,000	12	37,621,500	12	37,621,500	36	90,203,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			yang dilaksanakan												
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120,648,000		193,036,800		193,036,800		506,721,600	PAD		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	120,648,000	1	193,036,800	1	193,036,800	1	506,721,600	PAD		
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120,648,000		193,036,800		193,036,800		506,721,600	PAD		
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	5	120,648,000	8	193,036,800	8	193,036,800	8	506,721,600	PAD		
<b>2.15.0.00.0.00.01.03 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>						667,970,400		781,784,000		787,731,000		2,237,485,400	PAD		
Meningkatkan konektivitas wilayah			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		0.6865	667,970,400	0.8275	781,784,000	0.89	787,731,000	0.89	2,237,485,400	PAD	iku, ikk,	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Meningkatnya konektivitas angkutan jalan		Indeks konektivitas angkutan jalan		0.78	667,970,400	0,8	781,784,000	0,8	787,731,000	0,8	2,237,485,400	PAD	ikk,	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				667,970,400		781,784,000		787,731,000		2,237,485,400	PAD		
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	47,822,500	100	132,240,800	100	130,464,000	100	310,527,300	PAD		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47,822,500		132,240,800		130,464,000		310,527,300	PAD		
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung	Jenis	2	47,822,500	2	132,240,800	2	130,464,000	2	310,527,300	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			milik daerah yang dilaksanakan												
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35,895,000		110,370,000		106,324,000		252,589,000	PAD		
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	35,895,000	25	110,370,000	25	106,324,000	75	252,589,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11,927,500		21,870,800		24,140,000		57,938,300	PAD		
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	11,927,500	1	21,870,800	1	24,140,000	1	57,938,300	PAD		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	620,147,900	100	649,543,200	100	657,267,000	100	1,926,958,100	PAD		
		X.XX.01.2.06 Administrasi				98,653,720		129,054,000		129,528,000		357,235,720	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Umum Perangkat Daerah													
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	98,653,720	6	129,054,000	6	129,528,000	6	357,235,720	PAD		
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4,500,000		4,516,000		4,553,000		13,569,000	PAD		
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	4,500,000	1	4,516,000	1	4,553,000	1	13,569,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42,424,500		55,715,000		42,932,000		141,071,500	PAD		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	42,424,500	4	55,715,000	4	42,932,000	4	141,071,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18,424,720		16,850,000		18,645,000		53,919,720	PAD		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	4	18,424,720	4	16,850,000	4	18,645,000	4	53,919,720	PAD		
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24,424,500		47,124,000		49,434,000		120,982,500	PAD		
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	24,424,500	12	47,124,000	12	49,434,000	36	120,982,500	PAD		
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1,500,000		1,505,000		1,517,000		4,522,000	PAD		
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	2	500	2	505	2	517	6	1,522,000	PAD		
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	5000	1,000,000	3360	1,000,000	3360	1,000,000	11720	3,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				7,380,000		3,344,000		12,447,000		23,171,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	7,380,000	12	3,344,000	12	12,447,000	36	23,171,000	PAD		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				521,494,180		520,489,200		527,739,000		1,569,722,380	PAD		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	521,494,180	2	520,489,200	2	527,739,000	2	1,569,722,380	PAD		
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63,031,780		63,258,000		63,786,000		190,075,780	PAD		
			Jumlah langganan surat	Bulan	12	63,031,780	12	63,258,000	12	63,786,000	36	190,075,780	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola												
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			458,462,400	457,231,200	463,953,000	1,379,646,600	PAD						
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	19	458,462,400	19	457,231,200	19	463,953,000	19	1,379,646,600	PAD		

# BAB V

## P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Dinas Perhubungan dan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinas Perhubungan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil, Makmur dan Mandiri”**.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**AGUS NUR HADIE, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690829 199001 1 002